

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

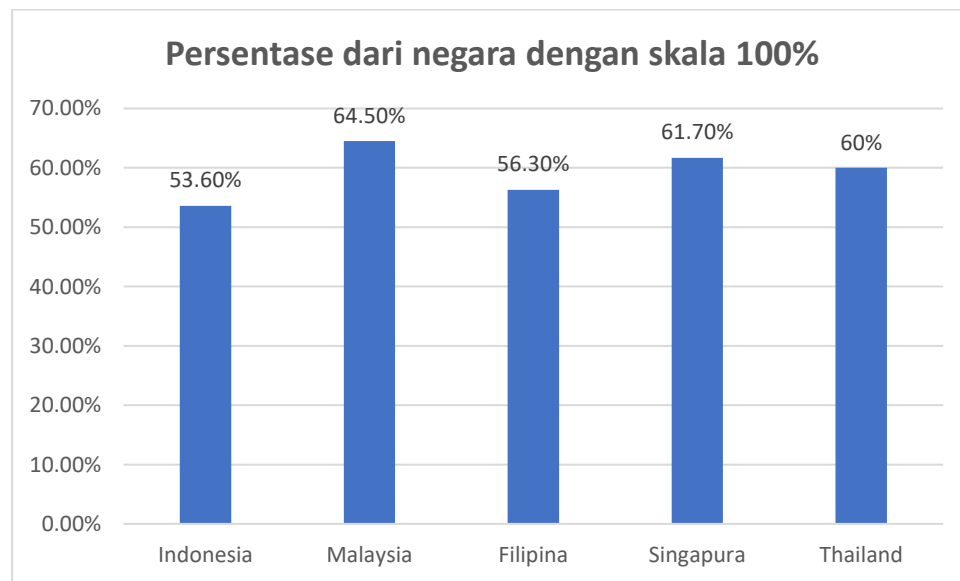
Perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya guna memastikan kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Tujuan ini seringkali memicu persaingan antar perusahaan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan demi memenuhi tuntutan pemangku kepentingan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan tidak dapat terlepas dari tanggung jawab sosial dan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, selain berupaya untuk mencapai keuntungan maksimal, perusahaan juga wajib bertanggung jawab atas dampak dari setiap aktivitas yang dilakukannya (Madona & Khafid, 2020). Dengan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak dari aktivitas yang dilakukannya sehingga tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat, maka perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak, tanpa merugikan lingkungan atau mengabaikan tanggung jawab sosial.

Dalam dunia bisnis tujuan utama perusahaan ini untuk memaksimalkan laba, tetapi dengan berkembangnya zaman tujuan dalam aktivitas perusahaan untuk memaksimalkan laba kini berubah menjadi konsep *quintuple bottom line* atau sering disebut 5P. Konsep 5P ini membuat perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup, yang pada dasarnya perusahaan hanya ingin memiliki keuntungan finansial saja dalam melaksanakan aktivitasnya. Konsep *quintuple bottom line* ini terdiri dari lima ukuran kinerja perusahaan yang terdiri dari manusia (*people*), lingkungan (*planet*), keuntungan (*profit*), tujuan (*purpose*), dan tempat (*place*) yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan yang lebih luas dalam bisnis untuk menyampaikan tujuan, hubungan relasional serta pengaruhnya, rencana

bisnis, dan dampaknya terhadap lingkungan (Panneels, 2023). Setelah perusahaan menyadari bahwa kondisi keuangan saja tidak dapat menjamin pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang yang berkelanjutan, maka perusahaan harus peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dapat menimbulkan masalah bagi mereka.

Pemerintah Indonesia telah menyusun regulasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas (PT), terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. PT yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mencakup kontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini kemudian dilaporkan sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan, yang menjadikannya bentuk laporan keberlanjutan. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengharuskan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan *sustainability report* atau laporan keberlanjutan yang dilaporkan secara bertahap mulai tahun 2020. Laporan ini harus mencakup kinerja perusahaan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. POJK ini juga mewajibkan perusahaan untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang merinci langkah-langkah keberlanjutan yang akan diambil, dan melaporkannya secara berkala dalam laporan keberlanjutan mereka. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan ini seharusnya berperan sebagai dorongan bagi perusahaan di Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab lainnya, seperti dampak ekonomi, keterlibatan pemangku kepentingan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keberagaman dan kesetaraan, yang kemudian dilaporkan dalam *sustainability report*.

Sustainability Report adalah praktik yang mencakup pengukuran, pengungkapan, dan evaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal (Kristianingrum et al., 2022). Menurut *Global Reporting Initiative* (2016), laporan keberlanjutan merupakan pelaporan secara transparan mengenai aktivitas perusahaan yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, termasuk kontribusi positif maupun negatif terhadap pembangunan berkelanjutan. Laporan ini disusun mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (Yani et al., 2024). GRI memiliki standar universal dan topik khusus. Seri 100 mencakup standar universal, yaitu GRI 101 (Fondasi), GRI 102 (Pengungkapan Umum), dan GRI 103 (Pendekatan Manajemen). Sementara itu, seri 200, 300, dan 400 berfokus pada topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengungkapan GRI terbagi menjadi 148 item serta pengukurannya dilakukan melalui analisis isi, dengan penilaian berdasarkan pengungkapan setiap item. Jika suatu item diungkapkan, maka diberi skor satu, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai nol. Setelah itu, untuk perhitungan variabel *sustainability report* dilakukan dengan jumlah total item yang diungkapkan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan total item yang diharapkan (Cahyaningsih & Mustapa, 2023).



Grafik 1. 1

Tingkat Pengungkapan Keberlanjutan di negara ASEAN

Sumber: *Sustainability Reporting In ASEAN Countries* (2018)

Pada grafik di atas pelaporan *sustainability report* rata-rata di Indonesia berada di angka 53,6% di bawah Filipina yang berada pada angka 56,3%. Hal ini mencerminkan masih kurangnya komitmen perusahaan di Indonesia dalam melakukan praktik keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholmi & Susadi (2021) bahwa dari 100 perusahaan teratas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hanya sekitar 30% yang menyusun atau mengungkapkan *sustainability report* (SR). Menurut penelitian Azzarah et al. (2024) salah satu perusahaan yang masih sedikit melaporkan laporan keberlanjutan yaitu perusahaan pada sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur adalah sektor yang memiliki peran penting dalam kemajuan suatu negara, terutama di negara-negara berkembang. Pembangunan infrastruktur merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan suatu negara di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan bidang lainnya (Zam-Zam et al., 2023). Dengan berkembangnya infrastruktur dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan, banyak perusahaan yang mengorbankan area ruang hijau demi pembangunan. Lingkungan menjadi terkena dampak negatif

karena kurangnya ketersediaan ruang hijau yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan manusia serta pembangunan infrastruktur yang semakin cepat (Christie & Ekadjaja, 2020). Dalam pembangunan infrastruktur berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti banjir, kehilangan habitat satwa langka, tanah longsor, keterbatasan akses air bersih, dan berbagai bencana lainnya (Soleha et al., 2024). Perusahaan Waskita Karya Tbk. adalah salah satu perusahaan di sektor infrastruktur jalan yang telah melakukan pencemaran. Perusahaan tersebut telah membuang bekas oli di tepi-tepi jalan yang berdekatan dengan perkebunan milik warga, sehingga sejumlah petani gagal panen yang mengakibatkan tanaman, kelapa, dan tomat berubah menjadi coklat (<https://sibelanews.id>).

Dalam pengungkapan *sustainability report* pada sektor infrastruktur masih sedikit perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia nomor 16/SEOJK.04/2021 yang menjelaskan bahwa pengungkapan *sustainability report* paling sedikit harus memuat informasi sebanyak 63 item yang setara dengan 43%.

Berikut tabel skor SRDI dari perusahaan sektor infrastruktur periode 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

No	Kode	INDEKS SRDI					RATA-RATA	KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	ACST	20%	35%	40%	40%	43%	36%	TM
2	ADHI	37%	39%	38%	52%	75%	48%	M
3	BALI	27%	39%	37%	56%	60%	44%	M
4	BTEL	23%	23%	25%	39%	41%	30%	TM
5	BUKK	20%	22%	39%	46%	56%	37%	TM
6	CASS	20%	24%	36%	43%	49%	34%	TM
7	CENT	16%	20%	24%	55%	59%	35%	TM
8	CMNP	0%	0%	0%	0%	47%	47%	TM

9	DGIK	0%	0%	0%	37%	41%	39%	TM
10	EXCL	43%	36%	39%	70%	75%	53%	M
11	FREN	30%	32%	36%	41%	45%	37%	TM
12	GOLD	0%	0%	47%	47%	50%	48%	TM
13	HADE	25%	26%	28%	47%	51%	35%	TM
14	IBST	24%	24%	26%	47%	49%	34%	TM
15	JKON	20%	34%	38%	47%	57%	39%	TM
16	JSMR	50%	43%	39%	49%	57%	48%	M
17	KARW	29%	31%	35%	37%	39%	34%	TM
18	KBLV	20%	32%	34%	35%	37%	32%	TM
19	LINK	20%	24%	47%	36%	67%	39%	TM
20	META	21%	33%	56%	51%	51%	42%	TM
21	NRCA	20%	22%	36%	36%	42%	31%	TM
22	PTPP	50%	50%	43%	70%	70%	56%	M
23	SSIA	19%	20%	61%	64%	70%	47%	M
24	SUPR	18%	17%	61%	59%	59%	43%	M
25	TBIG	30%	33%	42%	51%	55%	42%	TM
26	TLKM	17%	43%	47%	61%	63%	46%	M
27	TOTL	48%	48%	54%	72%	72%	59%	M
28	TOWR	22%	42%	49%	61%	64%	48%	M
29	WIKA	64%	67%	69%	73%	74%	69%	M
30	WSKT	48%	51%	41%	45%	32%	43%	M
31	IDPR	18%	20%	59%	60%	63%	44%	M
32	MTRA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
33	PORT	38%	39%	41%	43%	44%	41%	TM
34	TGRA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
35	TOPS	0%	36%	0%	0%	0%	36%	TM
36	MPOW	20%	22%	23%	31%	33%	26%	TM
37	GMFI	49%	39%	38%	52%	50%	46%	M
38	PPRE	0%	0%	0%	0%	51%	51%	TM
39	WEGE	0%	0%	0%	45%	73%	59%	TM
40	MORA	0%	0%	47%	59%	78%	61%	TM
41	IPCM	32%	32%	32%	52%	55%	41%	TM
42	LCKM	18%	20%	21%	49%	53%	32%	TM
43	GHON	20%	23%	28%	32%	34%	28%	TM
44	IPCC	16%	18%	43%	53%	49%	36%	TM
45	MTPS	30%	32%	36%	41%	45%	37%	TM
46	JAST	0%	0%	0%	0%	34%	34%	TM
47	KEEN	28%	30%	34%	34%	34%	32%	TM

48	PTPW	33%	34%	36%	38%	44%	37%	TM
49	TAMA	0%	0%	0%	0%	61%	61%	TM
50	RONY	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
51	PTDU	0%	0%	0%	41%	44%	43%	TM
52	KETR	0%	41%	41%	44%	47%	43%	TM
53	FIMP	0%	0%	0%	46%	47%	47%	TM
54	MTEL	0%	0%	45%	47%	47%	46%	TM
55	SMKM	0%	0%	27%	28%	29%	28%	TM
56	ARKO	0%	0%	33%	39%	47%	40%	TM
57	KRYA	0%	0%	0%	22%	26%	24%	TM
58	PGEO	49%	45%	68%	78%	78%	64%	M
59	BDKR	0%	0%	0%	45%	51%	48%	TM
60	INET	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TM
61	BREN	0%	0%	0%	0%	45%	45%	TM
62	KOKA	0%	0%	0%	0%	29%	29%	TM
63	ASLI	0%	0%	0%	0%	41%	41%	TM
64	MANG	0%	0%	0%	0%	44%	44%	TM
65	DATA	0%	0%	0%	0%	36%	36%	TM
66	OASA	22%	22%	47%	49%	51%	39%	TM
67	POWR	56%	66%	66%	78%	89%	71%	M
68	PBSA	22%	24%	26%	26%	28%	25%	TM
69	ISAT	22%	24%	27%	28%	29%	26%	TM

Sumber : Data diolah peneliti (2024)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase dari perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan pada sektor infrastruktur belum sesuai standar minimal pengungkapan laporan keberlanjutan. Terdapat 53 perusahaan belum memenuhi standar minimal pengungkapan laporan keberlanjutan dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut dari 69 perusahaan yang terdaftar atau setara dengan 77%. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan pada sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

Menurut penelitian Rohmawati & Widodo (2024) faktor yang memengaruhi *sustainability report* adalah pertumbuhan perusahaan, *slack resources*, dan *gender diversity*. Menurut penelitian Hidayah & Yusuf (2024) faktor yang memengaruhi *sustainability report* adalah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage*. Menurut penelitian Christianty et al. (2024) faktor yang memengaruhi *sustainability report* adalah kinerja keuangan, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Ikhsan & Wijayanti (2021) faktor yang memengaruhi *sustainability report* adalah profitabilitas, likuiditas, karakteristik perusahaan, dan *corporate governance*. Menurut penelitian Khanifah et al. (2021) faktor yang mempengaruhi *sustainability report* adalah *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

Perusahaan dengan pertumbuhan yang pesat cenderung menyajikan lebih banyak informasi terkait kinerja atau laporan lain dalam bentuk laporan keberlanjutan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang tumbuh lebih lambat, di mana keterbukaan informasi tentang kinerja perusahaan biasanya lebih terbatas, dan penyelesaian masalah bisnis yang kompleks menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perusahaan yang bertumbuh dengan pesat (Adawiyah et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al. (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, serta penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati & Widodo (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Astuti (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Leverage merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai besarnya aktiva perusahaan yang bersumber dari utang dan modal. Dengan tingkat *leverage* yang tinggi, maka perusahaan akan berupaya untuk

memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan dengan menyajikan laporan keberlanjutan, sehingga dapat mengalihkan tingginya tingkat *leverage* dalam perusahaan. Perusahaan dapat membuktikan telah menjalankan tanggung jawab sosial melalui laporan keberlanjutan dengan mencantumkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam laporan tersebut (Rahaditama, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianty et al. (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* serta penelitian yang dilakukan oleh Tobing et al. (2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh suatu perusahaan biasanya memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan termotivasi untuk mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan, sehingga akan lebih memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih rinci (Dewi et al., 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristianingrum et al. (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahaditama (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, serta penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Syafnita (2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Likuiditas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama utang yang sudah jatuh tempo dan rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat melunasi utang yang dimilikinya. Rasio likuiditas dapat membantu manajemen dalam menilai efisiensi penggunaan modal kerja dalam perusahaan, serta bermanfaat untuk

para pemegang saham dan kreditor dalam menilai peluang dividen dan pembayaran bunga di masa depan. Peluang pengungkapan *sustainability report* bisa menjadi semakin meningkat disebabkan karena semakin tingginya likuiditas perusahaan (Maulana & Syafnita, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamaluddin (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kristianingrum et al. (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*, dan penelitian yang dilakukan oleh Pambudi & Cahyono (2024) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh pertumbuhan perusahaan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan menyebabkan variabel moderasi ditambahkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional ditambahkan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui kedudukannya dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh antara pertumbuhan perusahaan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Alasan kepemilikan institusional dipilih sebagai variabel moderasi adalah karena kepemilikan institusional juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan *sustainability report* (Fathurohman et al., 2022). Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari total saham perusahaan yang beredar seperti perusahaan asuransi, perusahaan pemerintah, perusahaan dana pensiun, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional pada saham perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih tinggi untuk mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan (Ludianah et al., 2022).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tobing et al. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, objek yang digunakan dalam

penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2019-2023. Kedua, penelitian ini mengganti variabel ukuran perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan dari penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati & Widodo (2024) dan menambahkan variabel moderasi kepemilikan institusional dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2018). Alasan peneliti mengganti dan menambahkan variabel dalam penelitian ini karena berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan dalam penelitian Nuraini & Lastanti (2024) sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Ketiga, penelitian terdahulu masih ada kesenjangan mengenai variabel pertumbuhan perusahaan, dan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*?

6. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*?
7. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*?
8. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat membuktikan secara empiris dan menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report*.
5. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
6. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
7. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.
8. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan di bidang akuntansi mengenai pengungkapan *sustainability report* yang dipengaruhi oleh

pertumbuhan perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas dengan variabel moderasi kepemilikan institusional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif dan masukan pada perusahaan sektor infrastruktur dalam pengambilan keputusan mengenai pengungkapan *sustainability report* perusahaan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas dengan variabel moderasi kepemilikan institusional.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada investor agar lebih hati-hati dalam mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengungkapan *sustainability report*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.